

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber penerimaan daerah kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat dan investasi daerah. Dari periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan terbesarnya, hal itu dapat dilihat dari penerimaan transfer yang memiliki jumlah paling besar bila dibandingkan dengan sumber penerimaan lain yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan investasi daerah. Itu berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
2. Dilihat dari hasil perbandingan antara rata-rata tingkat kemandirian kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat dengan kriteria kemandirian daerah menurut Dasril Munir et al, 2004 : 47-49, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang rata-rata kemandiriannya sebesar 12,06%, maka tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat dikatakan masih dalam keadaan kurang, itu dikarenakan tingkat

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa transfer pemerintah pusat masih mendominasi terhadap penerimaan daerah kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Dari hasil pengujian terhadap sumber penerimaan daerah diketahui bahwa tidak semua sumber penerimaan daerah yaitu PAD, transfer pemerintah pusat, dan dana penyertaan modal/investasi, berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemandirian daerah, hanya pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki pengaruh terhadap kemandirian daerah, sementara transfer pemerintah pusat dan dana penyertaan modal/investasi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Transfer dari pemerintah pusat memang sangat dibutuhkan, ini untuk mengantisipasi kesewenangan dari pemerintah daerah dalam menarik jumlah penerimaan daerahnya, akan tetapi sebaiknya pemerintah pusat memperhatikan jumlah transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai sumber penerimaan daerahnya.

2. Semakin tinggi transfer dari pemerintah pusat akan menurunkan tingkat kemandirian daerah, jadi dalam hal ini pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah, sehingga untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki daerah dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dialami oleh penulis, keterbatasan – keterbatasan yang dialami penulis adalah :

1. Referensi dari penelitian sebelumnya tidak banyak, sehingga acuan dari penelitian ini mendasarkan pada laporan keuangan yang ada.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan belum diaudit oleh BPK, sehingga tingkat keakuratan data dilapangan belum teruji.
3. Pengukuran tingkat kemandirian daerah belum ada aturan yang baku, sehingga diasumsikan dengan tingkat kemandirian yang diukur dari persentase pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

4. Keterbatasan dari data yang diperoleh, seperti data dan literatur yang menjelaskan tolok ukur kemandirian daerah belum ada.
5. Pemerintah pusat tidak mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah, sehingga data maupun informasi mengenai tingkat kemandirian daerah hanyalah asumsi belaka.

